



PEMERINTAH KOTA SOLOK



**RENCANA AWAL (RANWAL)
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**



JL. LUBUKSIKARAH NO. 89 KOTA SOLOK

KATAPENGANTAR

Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2022 – 2026. Program dan Kegiatan pada Ranwal Renja Tahun 2025 ini mengacu pada Program dan Kegiatan pada Renstra BPBD tahun ke-4 dengan beberapa penyesuaian sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program / kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungan dan pencapaian indikator yang ditetapkan dalam Renstra.

Rencana Awal Rencana Kerja BPBD Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Ranwal Renja merupakan dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Awal Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja PD tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program dan kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Solok, Januari 2024
KEPALA BPBD KOTA SOLOK

HERMAN, SH, S. Sos
NIP. 19771230 199303 1003

DAFTARISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	6
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	40
 BAB V PENUTUP.....	60
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Solok mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Ranwal Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam RKPD, KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Ranwal Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, antara lain:

1. Ranwal Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Program dan Kegiatan dalam ranwal Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2022–2026;
4. Program dan Kegiatan dalam Ranwal Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;

5. Program dan Kegiatan dalam Ranwal Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya

Payakumbuh;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;

22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. UNDANG-UNDANG/ PP/ PERPRES/ PERMEN yang terkait dengan urusan yang dilaksanakan OPD (Misal UU Pendidikan, UU Kesehatan, dst.) ;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
26. Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026;
27. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2025 serta panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Ranwal Renja BPBD Kota Solok Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan dan acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Ranwal Renja BPBD Kota Solok Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU, Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, yang berisi penjelasan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok berada pada Bidang Trantibumlinmas dengan 2 (Dua) Program Penanggulangan Bencana dan terdiri dari 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini di BPBD adalah sebesar Rp.3.509.095.045,- atau sebesar 39,38 %. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan Direvocusing sesuai dengan rencana dilaksanakan sampai pada Triwulan IV

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Secara rinci, hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja PD

1. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 342.200 dan teralisasi sebesar Rp. 335.900,- atau sebesar 98.16%
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 368.200,- dan teralisasi sebesar Rp. 355.900,- atau sebesar 98.66%
3. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ihtisar reliasasi kinerja SKPD Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 500.800,- dan teralisasi sebesar Rp. 487.000,- atau sebesar 97.24%
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 358.600,- dan teralisasi sebesar Rp. 351.100,- atau sebesar 97.91%

B. Administrasi Keuangan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1,473.183.055,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 1,385.903.571,- atau sebesar 94.08%

2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semester SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.342,400,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk pembelian ATK, bahan cetak, bahan komputer untuk laporan. Kegiatan ini sampai dengan akhir Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 334.600 atau sebesar 97.72 %

C. Administrasi umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.10,441,800,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk tersedianya ATK, benda pos, dan bahan komputer.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi sebesar Rp.10.175.000,- atau sebesar 97.45 %. Hal ini disebabkan karena rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan.

2. Penyediaan peralatan rumah tangga

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2,020,000,-. Tujuan kegiatan ini untuk pengisian tabung gas, bahan untuk bahan kegiatan kantor lainnya.

Penyediaan peralatan rumah tangga terealisasi sebesar Rp. 1.962.100,- atau sebesar 97.13 %. Hal ini disebabkan karena rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan.

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5,784,000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan kelancaran operasional administrasi kantor, dengan sasaran pelaksanaan kegiatan tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

Bahan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi sebesar Rp.5.777.500,- atau sebesar 99.89%. Hal ini disebabkan karena rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan.

4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.109.718.400,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya koordinasi tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp.105.562.729,- atau sebesar 96.21 %.

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1,637,300,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk tersedianya alat/ bahan untuk kegiatan listrik kantor. Kegiatan ini sampai dengan akhir direalisasikan pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.632.500,- atau sebesar 99.71%

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.055.090,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk tersedianya ATK, dan bahan komputer.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 22.590.440,-.

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.315.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan personal printer.

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya direalisasikan pada Triwulan IV sebesar Rp. 3.300.000,- atau sebesar 99.55%

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.270.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini pembeayaan rekening telepon dan terjaganya penerangan bangunan kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor, dan terjaganya penerangan bangunan.

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 5.230.000,- atau sebesar 99.24%

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 783.102.000,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini pembeayaan jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN dan iuran jaminan kematian bagi Non ASN. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor sampai Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 758.196.000,- atau sebesar 96.82%

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.150.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk kelancaran operasional kantor.

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 71.032.600,-. Atau sebesar 94.52%

2. Pemeliharaan/rehabilitasi sasaran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.400.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan service alat kantor, alat pendingin, personal komputer.

Pemeliharaan/rehabilitasi sasaran dan prasarana pendukung gedung kantor sampai Triwulan IV sebesar Rp. 2.022.750,- atau sebesar 84.28%.

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

G. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi rawan bencana kepada masyarakat .

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) telah dilaksanakan dibulan Juni, namun realisasi keuangannya pada belum terealisasikan.

H. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 37.500.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk belanja bimbingan teknis dan perjalanan dinas biasa.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota sampai triwulan IV sebesar Rp. 35.495.289,- atau sebesar 94.65%

b. Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/ kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 829.456.200,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemantauan bencana alam dan siaga bencana, piket TRC, dan Premi BPJS kesehatan. Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.786.844.500,- atau sebesar 94.86 %.

c. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.4.500,000. tujuan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan perlindungan bagi anggota TRC yang ada dilapangan.

Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 2.240.000,- atau sebesar 49.78%.

d. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.500.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pembentukan kelurahan tangguh bencana, dan unsur pengarah.

Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan sampai triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 67.500.000,- atau 89,40%

e. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/ kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/ kota ini sebesar Rp. 5.930.000,-.

Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/ kota sampai direalisasikan pada triwulan IV sebesar Rp. 5.930.000,- atau sebesar 97.72%

f. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,-. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

I. Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana

a. Pencarian, Pertolongan, dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.39.220.000,-. Tujuannya pelaksanaan kegiatan ini untuk belanja jasa tenaga penanganan bencana.

Pencarian, Pertolongan, dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 39.000,000,-.atau sebesar 99%

b. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk pembelian logistik (nasi bungkus) untuk korban bencana alam. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kotaterealisasi sebesar Rp. 6.172,000,-.

J. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPenyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,-.Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk belanja jasa tenaga ahli dan perjalanan dinas biasa.

TABEL TC-29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023

KOTASOLOK

NAMAPERANGKATDAERAH:BADAN PENANGGULANGANBENCANADAERAH KOTASOLOK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target Renja PDTahun 2022	Realisasi Renja PDTahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.916.581.540	4,360,652,115	88.69%	3,509.095.045	3.318.897.379	94.58
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %			2.641,616,345	1,712,121,310	64.81%
1	05	01	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100			1,569,800	1,529,900
1	05	01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2			342,200	335,900
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4			368,200	355,900
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4			500,800	487,000

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16					358,600	351.100	
1	05	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %		1.741.116.940	1,402,344,335	80.54%	1.473.183.055	1.385.903.571	94.08
1	05	01	2	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Gajidan Tunjangan ASN	12 bulan		1.739.617.140	1,400,991,335	98.45%			
1	05	01	2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Akhir Tahun	1 dokumen		1.499.800	1,353,000	90.21%			
						Laporan capaian kinerja SKPD	12 dokumen							
						Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	1 dokumen							
						Laporan Keuangan SKPD:	12 bulan							
						Laporan Kinerja (LKJ)	1 dokumen							
						Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	1 dokumen							
						Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen							
						Perubahan Renja PD tahun 2022	1 dokumen							
						Renja PD tahun 2023	1 dokumen							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan					342,400	334.600	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		179.363.450	173,843,250	96.92%	191,594,090	78,111,089	40.77%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	53 Paket					1,637,300	1.632.500	99.71
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket					23.055.090	22.590.440	97.98
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	12 bulan		26.623.500	25,667,500	96.41%	10,441,800	10.175.900	97.45
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan kantor	12 bulan		3.699.400	3,699,400	100.00 %	2,020,000	1.962.100	97.13
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan		4.555.250	4,413,550	96.89%	5,784,000	5.777.500	99.89
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		144.485.300	140,062,800	96.94%	109.718.400	105.562.729	96.21
						Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan							

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %		9.705.000	9,255,000	95.36%	44,005,000		
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Drone	1 unit		9.705.000	9,255,000	95.36%			
						Komputer	2 unit							
						Laptop	2							
						Printer	2 unit							
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						40,690,000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						3,315,000	3.300.000	99.55
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100 %		838.735.300	837,562,200	99.86%			
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Biaya alat listrik dan elektronik	12 bulan		6.469.300	5,328,200	82.36%			
						Jasa telepon	12 bulan							
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pengurus/penyimpan barang	12 bulan		832.266.000	832,234,000	100.00 %			
						Honor Bendahara Pengeluaran	12 bulan							
						Honor Pegawai Kontrak	3 orang							
						Honor pegawai sukarela	44 orang							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						783,102,000	758.196.000	96.82
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5,270,000	5.230.000	99.24
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %		175.583.250	98,539,650	56.12%			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (7 unit)	84 unit bulan		168.183.250	91,639,650	54.49%	75.150.000	71.032.600	94.52

1	05	03	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana < 24 Jam	100	%		123.750.000	66,220,000	53.51%			
1	05	03	2	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian Korban Bencana Alam Kab/Kota	100	%		73.750.000	44,620,000	60.50%	39.220.000	39.000.000	99.5
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana									
1	05	03	2	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bahan Pangan	1	paket		50,000,000	21,600,000	43.20%			
						Obat-obatan	1	paket							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							20.000.000	6.172.000	30.86
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	%							
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah									


KEPALA BPBD KOTA SOLOK
 BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH

HERMAN, SH, S. Sos
 NIP. 19771230 199303 1003

1. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Solok

Secara umum, Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Informasi Rawan bencana, dengan Kegiatan Sosialisasi komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab/Kota Perjenis Kegiatan
Capaian 100% fisik dan 0% keuangan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan edukasi melalui mobil ranger diseluruh kota solok
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana capaian 100% dan Keuangan 100%
Untuk capaian fisik kegiatan ini melebihi peserta, dimana dalam anggaran hanya untuk 3 paket saja, akan tetapi dijadikan diseluruh peserta regu TRC yang mengikutinya.
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana
Yang mana capaian kegiatan ini mencapai 100% fisik
 - Penyediaan peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Kegiatan ini mencapai fisik 100% yakni servis mesin sinsow
 - Penguatan kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan
Kegiatan ini merupakan pembayaran unsur pengarah
 - Pengembangan Kapasitas TRC dengan fisik 100%
 - Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana
Fisik kegiatan 100% dan dan anggaran Rp. 0,-
- c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kab/kota
Kegiatan ini merupakan fisik 100% salah satu jenis kegiatan yakni mencari korban erupsi gunung merapi
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kab/Kota
Yakni kegiatan penyerahan logistik untuk masyarakat yang terkena dampak bencana
- d. Penataan Sistem dasar penanggulangan Bencana
 - Penyusunan / regulasi penanggulangan bencana
 - Kegiatan ini merupakan kegiatan yang anggarannya Rp. 0 dikarenakan refocusing anggaran

2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

BPBD Kota Solok dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan peraturan daerah. Perda ini disusun untuk menindak lanjuti Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut juga memutuskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Berdasarkan peraturan- peraturan tersebut, juga disusun Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah. Berdasarkan Perwako tersebut, BPBD mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, BPBD Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain:

Tabel 2.1

FAKTOR-FAKTOR DALAM PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat
1	Kurangnya pemahaman akan pentingnya penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana (preventif).	Paradigma penanganan bencana yang dilaksanakan setelah terjadi bencana, hingga BPBD hanya akan bekerja pada saat terjadi bencana. Padahal dengan UU no 24 tahun 2007, penanganan bencana bersifat proaktif harus diintegrasikan dalam pembangunan yang berkesinambungan.

2	Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, keahlian, pengalaman, pengetahuan dan integritas dalam penanggulangan bencana.	SDM yang dimaksud mencakup petugas/ pegawai diinternal BPBD yang memiliki tupoksi terkait penanggulangan bencana, maupun eksternal BPBD yang memiliki Keterkaitan kerja atau pengambil
		Kebijakan yang menentukan arah Penanggulangan bencana di Kota Solok.
3	Keterbatasan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.	Kebutuhan penanggulangan bencana /musibah memerlukan anggaran yang lebih banyak dari pelaksanaan kegiatan rutin terjadwal, karena memerlukan fasilitas dan sarana tertentu terkait tugas dan tanggung jawab terhadap kejadian luar biasa seperti penanggulangan kebakaran, penyelamatan korban bencana dan Pengurangan resiko bencana.

Disamping hambatan tersebut diatas, ada beberapa tantangan dan peluang dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- Tantangan:
 - Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah dalam rangka perwujudan *good governance*
 - Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik
 - Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
 - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
- Peluang:
 - Tersedianya dana dari APBD yang memadai
- Perumusan isu-isu strategis :
 - Perihal kebencanaan sudah mulai menjadi isu utama dalam pembangunan. Karena itu terdapat potensi untuk membuat peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam

menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif untuk penanggulangan bencana. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat agar piranti tersebut dapat berjalan dengan baik.

- Pemberian pelayanan diupayakan mengacu kepada Standard Operation Prosedur (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan SOP ini seharusnya dimiliki oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- SDM masih perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan, dengan menyelenggarakan bentuk pendidikan formal maupun non formal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang urusan penanggulangan bencana dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatan.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Badan Penanggulangan Bencana meningkatkan pelayanan dibidang penanggulangan bencana.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths* /kekuatan, *Weaknesses*/ kelemahan, *Opportunities*/ peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan(*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength):

- Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- Adanya peraturan- peraturan pendukung
- Adanya dukungan dari masyarakat

Kelemahan (Weaknesses):

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
- Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai Pelaksanaan tupoksi belum optimal

Peluang (Opportunities):

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat
- Perkembangan teknologi dan informasi

Ancaman (Threats):

- Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang Penanggulangan Bencana
- Potensi Bencana yang dihadapi Kota Solok
- Belum tersedia aturan yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana

**Tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Solok dan kaitannya dengan
Prosedur Pelaksanaan tugas.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standar isasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran ruang dan barang
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, maka susunan organisasi BPBD Kota Solok terdiri atas:

- a. Kepala BPBD(exoficio)SekretarisDaerah
- b. Unsur Pengarah,Terdiri dari Instansi danTenaga Profesional/Ahli
- c. Unsur Pelaksana.Terdiri dari
 - Kepala Pelaksana
 - Kepala Sekretariat
 - Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kasi Kedaruratan dan Logistik
 - Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara struktur organisasi, saat ini BPBD mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional perencana belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan BPBD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana dilembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan

dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum mencukupinya SDM yang tersedia diBPBD
2. Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholders;
3. Belum digunakannya data dan informasi pembangunan secara optimal;
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
5. Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi.

3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja BPBD Kota Solok Tahun 2024, ProgramKegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Renstra BPBD tahun2021-2026, yang selanjutnya akan diselaraskan dengan RKPD kota Solok tahun 2024.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun2024											
KotaSolok											
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2,532,473,020	PROGRAMPENUNJANG RUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,785,720,322	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Solok	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		1,877,700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Solok	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		3,755,400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Solok	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	1,418,570,930	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Solok	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	1,560,428,023	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KotaSolok	Rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Solok	Rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100%	0	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	189,633,390	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	208,596,729	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Solok	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	78,139,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Solok	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	85,952,900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Solok	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	739,286,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Solok	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	813,214,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Solok	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	104,966,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Solok	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	115,462,600	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Solok	Persentase masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana	100%	992,602,500	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Solok	Persentase masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana	100%	1,091,862,750	

	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Solok	Persentase Kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan informasi	100%	10,825,000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Solok	Persentase Kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan informasi	100%	11,907,500	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Solok	Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	889,827,500	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Solok	Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	978,810,250	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Solok	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana <24jam	100%	91,950,000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Solok	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana <24jam	100%	101,145,000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Solok	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	0	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Solok	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	0	
Total					3,525,075,520					3,877,583,072	

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, tetapi BPBD mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menyangkut dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya BPBD Kota Solok akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangandan pengamatan pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2010, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Reformasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah tertinggal, terdapat, terluar dan pasca konflik
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya dibidang Politik Hukum dan Keamanan
13. Prioritas lainnya bidang perekonomian
14. Prioritas lainnya dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok maka prioritas pembangunan yang terkait dengan Tugas Fungsi BPBD adalah Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Dengan mengacu pada peraturan Permendagri no. 69 tahun 2012 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 maka ditetapkan indikator kinerja BPBD sebagai berikut:

- ✓ Persentase Kawasan Rawan Bencana yang mendapat Informasi
- ✓ Persentase Kawasan Rawan Bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
- ✓ Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana <24jam

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan:
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Sasaran:

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel3.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Penanggulangan Bencana	Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana	Persentase kawasan Rawan bencana yang mendapat informasi	100%
			peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase kawasan Rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan bencana	66.67%
			Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penyelamatan Dan evakuasi korban bencana <24 jam	100%

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kota Solok

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Solok	100 %	2,532,473,020	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	2,785,720,322	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Solok		1,877,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	3,755,400	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kota Solok	100 %	1,418,570,930	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1,560,428,023	
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah	Kota Solok	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	0	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok	100 %	189,633,390	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	208,596,729	
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Kota Solok	100 %	78,139,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	85,952,900	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Solok	100 %	739,286,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	813,214,600	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkeadaan baik	Kota Solok	100 %	104,966,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	115,462,600	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana	Kota Solok	100 %	992,602,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1,091,862,750	
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kawasan rawan bencana yang mendapatkan pelayanan informasi	Kota Solok	100 %	10,825,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	11,907,500	
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Solok	100 %	889,827,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	978,810,250	

1	05	03	2.03	Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana < 24 jam	Kota Solok	100	%	91,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	%	101,145,000
				Kegiatan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Solok	100	%	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	%	0
Total										3,525,075,520				3,877,583,072

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mengacupada strategi yang telah dianalisis, berikut rekapitulasi program dan kegiatan BPBD Kota Solok:

- Jumlah program sebanyak 2 program sedangkan total kegiatan adalah sebanyak 9 kegiatan.
- Rencana penyebaran lokasi program dan kegiatan BPBD pada tahun 2024 sebagian besar tersebar keseluruh kawasan di Kota Solok yang mencakup seluruh masyarakat dari berbagai tingkat usia, pendidikan, dan pekerjaan.
- Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana yang membidangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok idealnya akan memberikan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kota Solok.

Berikut program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana tahun 2024:

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana(Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 		2.532.473.020
				1.877.700
				466.500
				474.300
				466.500
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 		470.400
				1.418.570.930
				1.418.170.930
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum Perangkat Daerah 		400.000
				189.633.390
			1.638.300	
			10.446.000	
			2.012.000	
			22.999.390	

			<ul style="list-style-type: none"> kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	<p>5.875.500</p> <p>146.662.200</p> <p>78.139.000</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan mebel • Pengadaan Peralatan dan mesin 	<p>40.904.000</p> <p>37.235.000</p> <p>739.286.000</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 	<p>5.270.000</p> <p>734.016.000</p> <p>104.966.000</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, panak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan • Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya 	<p>102.566.000</p> <p>2.400.000</p> <p>992.602.500</p>
2.	Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Komonikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/Kota (perjenis ancaman bencana) • Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan • Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana • Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota • Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kab / kota • Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab/ kota • Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kab/kota 	<p>10.825.000</p> <p>10.825.000</p> <p>889.827.500</p> <p>795.000</p> <p>4.320.000</p> <p>15.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>860.012.500</p> <p>91.950.000</p>

		Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan logistik penyelamatan dan vakuasi korban bencana kab/kota 	59.550.000
				32.400.000
		Jumlah		3.525.075.520

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pencapaian SPM (Standar Pelayan Minimal)

Pencapaian SPM tahun 2024

SPM BPBD merupakan bagian trantibumlinmas ,Program penanggulangan bencana yang terdiri dari :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- b. Gender Analysis Pathway (GAP)

Program Kegiatan dan Sub kegiatan untuk kegiatan Gender analysis Pathway (GAP) yakni merupakan salah satu merupakan kegiatan SPM yakni :

Kegiatan Penanggulangan bencana

Kegiatan Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana kesiapsiagaan terhadapn bencana

Format kegiatan GAP terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Awal (ranwal) Rencana Kerja (renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok mengkaji mengenai program dan kegiatan yang direncanakan dalam pembangunan Kota Solok terkait kesejahteraan dan kepentingan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Kajian ini menguraikan dengan ringkas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian sasaran dan tujuan BPBD. Perencanaan yang ditetapkan telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun tantangan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

Renja ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok tahun 2025. Dengan analisa dan perencanaan yang telah dilaksanakan, diharapkan BPBD dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dapat memaksimalkan semua potensi yang ada untuk pengurangan resiko bencana.

Setelah tersusunnya Rencana Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2025, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

KEPALA BPBD KOTA SOLOK

HERMAN, SH, S. Sos
NIP. 19771230 199303 1003

WALIKOTASOLOK

ZULELFIAN UMAR

MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kinerja
<p>Program : Penanggulangan Bencana</p> <p>Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota Solok terhadap ancaman bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah Kota Solok 57, 64 km² - Jumlah Penduduk Kota Solok : Tahun 2023 "82.478 Jiwa" LK : 41.072 Jiwa PR : 41.406 Jiwa - Jumlah Relawan : 37 org - Jumlah Kecamatan : 2 - Jumlah Kelurahan : 13 - Kelurahan rawan Bencana : Kelurahan KTK dan Koto Panjang, IX Korong, Sinapa - Jumlah kelurahan yang sudah mengikuti sosialisasi : 9 kelurahan dengan total peserta 100 (25/Kel) 20% disarankan pesertanya perempuan - Materi sosialisasi tentang Banjir dan Tanah Longsor - Sarana dan prasarana yang ada pada BPBD : Perahu Karet, Mesin 	<p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua kelurahan mendapatkan sosialisasi mengenai bencana <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya respon dari kalangan perempuan untuk mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana - Belum ada peran serta perempuan sebagai relawan khususnya dalam penanganan pasca bencana <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pengetahuan ibu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah dan kualitas SDM untuk penanggulangan bencana - Belum optimalnya sosialisasi kebencanaan untuk masyarakat - Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Stigma di masyarakat relawan hanya untuk laki-laki - Kurangnya kepedulian Perempuan untuk menguasai cara-cara penanggulangan bencana - Fokus penanggulangan masih pada penanganan fisik belum penanganan pasca bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana: - Melaksanakan pelatihan untuk SDM sebagai fasilitator tangguh bencana - Melakukan sosialisasi dan simulasi kebencanaan di kelurahan rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah Kota Solok 57, 64 km² - Jumlah Penduduk Kota Solok : Tahun 2023 "82.478 Jiwa" LK : 41.072 Jiwa PR : 41.406 Jiwa - Jumlah Relawan : 37 org - Jumlah Kecamatan : 2 - Jumlah Kelurahan : 13 - Kelurahan rawan Bencana : Kelurahan KTK dan Koto Panjang, IX Korong, Sinapa - Jumlah kelurahan yang sudah mengikuti sosialisasi : 9 kelurahan dengan total peserta 100 20% disarankan pesertanya perempuan (25/Kel) - Materi sosialisasi tentang Banjir dan 	<p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya sosialisasi dan simulasi kebencanaan sebanyak 1 kali - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi : 25 orang/kelurahan <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang tangguh dalam menanggapi bencana - Meningkatkan pengetahuan Perempuan terhadap penanggulangan bencana

	<p>Perahu, Mobil Operasional, Sepeda Motor Trabas</p> <p>- Jenis bencana yang terjadi di Kota Solok: banjir, Longsor, Gempa, Angin kencang/Puting Beliung, Kebakaran dan Kebakaran Lahan</p>	<p>-ibu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</p>					<p>Tanah Longsor</p> <p>- Sarana dan prasarana yang ada pada BPBD : Perahu Karet, Mesin Perahu, Mobil Operasional, Sepeda Motor Trabas</p> <p>- Jenis bencana yang terjadi di Kota Solok: banjir, Longsor, Gempa, Angin kencang/Puting Beliung, Kebakaran dan Kebakaran Lahan</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



KEPALA BPBD KOTA SOLOK
 HERMAN, SH, S. Sos
 NIP. 19771230 199303 1003

Gender Budget Statement (GBS)

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Solok
Unit Organisasi DAERAH	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Program	: PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan Bencana	: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Sub Kegiatan Kesiapsiagaan	: 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Output Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none">- Pembinaan Kelembagaan PRB- Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana- Terlaksananya sosialisasi : Banjir, gempa bumi, longsor, kabut asap- Media Informasi kebencanaan
Tujuan Kegiatan	: Terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana dan terlatihnya anggota TRC dalam bidang penyelamatan terhadap bencana
Analisis Situasi	: Data Pembuka Wawasan : <ul style="list-style-type: none">- Luas Wilayah Kota Solok 57, 64 km²- Jumlah Penduduk Kota Solok : Tahun 2023 "82.478 Jiwa" LK : 41.072 Jiwa PR : 41.406 Jiwa- Jumlah Relawan : 37 org- Jumlah Kecamatan : 2- Jumlah Kelurahan : 13- Kelurahan rawan Bencana : Kelurahan KTK dan Koto Panjang, IX Korong, Sinapa- Jumlah Kelurahan yang sudah mengikuti sosialisasi : 9 kelurahan dengan total peserta 100(25/kel)- Materi sosialisasi tentang banjir dan tanah longsor- Sarana dan prasarana yang ada pada BPBD : Perahu karet, Mesin Perahu, Mobil Operasional, Sepeda Motor Trabas- Jenis bencana yang terjadi di kota solok : banjir, longsor, gempa, angin kencang/putting beliung, kebakaran dan kebakaran lahan

Isu Gender (factor kesenjangan):

Akses :

- Belum semua kelurahan mendapatkan sosialisasi

Partisipasi :

- Kurangnya respon dari kalangan perempuan untuk mengikuti sosialisasi
- Belum ada peran serta perempuan sebagai relawan khususnya dalam penanganan pasca bencana

Control :

- Mendata kelurahan yang belum mendapatkan sosialisasi dan kerawanan bencana di daerah tersebut

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender

Internal :

- Kurangnya jumlah dan kualitas SDM untuk penanggulangan bencana
- Belum optimalnya sosialisasi kebencanaan untuk masyarakat
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender

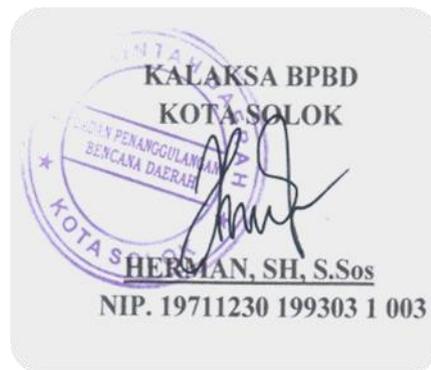
Ekternal :

- Stigma di masyarakat relawan hanya untuk laki-laki
- Kurangnya kepedulian perempuan untuk menguasai cara-cara penanggulangan bencana
- Focus penanggulangan masih pada penanganan fisik belum penanganan pasca bencana

Rencana Aksi : - Fasilitasi Kelurahan tangguh Bencana
- Melakukan pelatihan untuk SDM sebagai fasilitator tangguh bencana
- Melakukan sosialisasi dan simulasi kebencanaan di kelurahan rawan bencana

Alokasi Anggaran : **Rp 860.000.000**

Dampak / Hasil Output : - tersedianya Kelurahan tangguh Bencana



**KALAKSA BPBD
KOTA SOLOK**

HERMAN, SH, S.Sos

NIP. 19711230 199303 1 003



NIP. 19711230 199303 1 003